PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2026

KATA PENGATAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Perubahan Renja Tahun 2026 merupakan penyesuaian terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2026 serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal perencanaan, penyesuaian kemampuan keuangan daerah, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta penerapan kebijakan efisiensi anggaran.

Perubahan Renja ini memuat penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, serta pendanaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh selama sisa Tahun Anggaran 2026. Melalui dokumen ini diharapkan pelaksanaan pembangunan pada urusan ketenagakerjaan dan perindustrian dapat berlangsung lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025–2029.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan dokumen perencanaan pada masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, informasi, serta masukan dalam proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota

Payakumbuh Tahun 2026. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan ketenagakerjaan, dan pengembangan sektor perindustrian di Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Juli 2026
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh

YASRIL, S.ST.,MT
Pembina TK I
NIP. 19691017 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 622

1.1 Latar Belakang 622

1.2 Landasan Hukum 625

1.3 Maksud dan Tujuan 628

1.4 Sistematika Penyusunan Renja Perubahan 629

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 630

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Sampai dengan Bulan Juni (Triwulan II) Tahun 2026 630

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .. 669

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Perubahan Renja 694

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 699

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 699

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 702

III.3 Program dan Kegiatan 704

BAB IV PENUTUP 751

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN BULAN MARET TAHUN 2026 KOTA PAYAKUMBUH	633
Tabel 2.2	:	CAPAIAN IKU TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	670
Tabel 2.3	:	CAPAIAN IKD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	678
Tabel 2.4	:	CAPAIAN IKK TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	684
Tabel 2.5		PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH	690
Tabel 3.1	:	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 KOTA PAYAKUMBUH	706

H. DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2026. Renja menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan serta sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya, perkembangan kondisi internal maupun eksternal dapat menyebabkan terjadinya perubahan terhadap asumsi yang digunakan pada saat penyusunan Renja. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun sebagai tindak lanjut atas Perubahan RKPD Tahun 2026 untuk menjamin keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi, yaitu :

1. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 yang menunjukkan adanya target kinerja dan realisasi anggaran yang perlu disesuaikan.
2. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal penyusunan RKPD Tahun 2026, baik yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, kebutuhan pelayanan masyarakat, maupun dinamika pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Penyesuaian target pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang berdampak pada perubahan pagu anggaran perangkat daerah.

4. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang memengaruhi prioritas pembangunan, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada urusan ketenagakerjaan dan perindustrian.
5. Kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan optimalisasi penggunaan sumber daya serta penyesuaian prioritas program dan kegiatan agar tetap mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh perlu melakukan penyesuaian terhadap target indikator kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, indikator keluaran, lokasi, kelompok sasaran, serta pagu anggaran yang dituangkan dalam Perubahan Renja Tahun 2026. Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian serta mendukung pencapaian sasaran, tujuan, dan target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025–2029 dan Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Dengan demikian, Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan selama sisa Tahun Anggaran 2026, sekaligus menjadi dasar penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 menjadi pedoman dalam melakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, serta pagu anggaran, sehingga pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025–2029, serta perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 265 ayat (3) disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Dengan demikian dokumen perencanaan tahunan ini harus dapat

mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD.

Perubahan Renja Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh dan menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatory peraturan perundang-undangan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh menyusun dokumen Perubahan Renja ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan Tahun 2026.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Kota Payakumbuh dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada perubahan RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
c. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Oleh karenanya penyusunan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dalam menyesuaikan situasi dan

kondisi pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, agar pelayanan penyelenggaraan administrasi dapat maksimal/berjalan lancar.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6757).

5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977).
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220).
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227).
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45).
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25).
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 68).

23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 71).
24. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.
25. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama sisa tahun anggaran 2026 yang telah disesuaikan dengan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja sampai dengan Triwulan II, perkembangan kondisi yang memengaruhi pencapaian target pembangunan daerah, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Perubahan Renja ini juga dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tetap efektif, efisien dan akuntabel.

I.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 bertujuan untuk :

a. Menyesuaikan target kinerja, program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu anggaran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.
b. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan dengan perubahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.
c. Mengakomodasi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal perencanaan, baik yang berkaitan dengan

kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah maupun kebutuhan pelayanan masyarakat.

d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan agar sasaran pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian dapat tercapai secara optimal.
e. Menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi serta penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan Nasional, dan Pemerintah Kota Payakumbuh, Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh serta Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Sampai dengan Bulan Juni (Triwulan II) Tahun 2026

Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 secara umum telah mengacu pada target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029 dan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026. Sampai dengan Triwulan II, sebagian besar program, kegiatan, dan sub kegiatan telah mulai dilaksanakan sesuai jadwal, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisik maupun keuangannya belum optimal.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Triwulan II, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memerlukan penyesuaian target maupun alokasi anggaran sebagai akibat perkembangan kondisi pelaksanaan, perubahan kebijakan pemerintah, efisiensi belanja daerah, serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah.

Evaluasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Perubahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memengaruhi mekanisme pelaksanaan kegiatan.
2. Penyesuaian pagu anggaran sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi belanja daerah.
3. Perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha pada sektor ketenagakerjaan dan perindustrian.
4. Dinamika pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta administrasi pelaksanaan kegiatan.

Secara umum, capaian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 agar target kinerja pada akhir tahun dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, realisasi, tingkat capaian, serta perkiraan capaian sampai akhir Tahun 2026 disajikan pada tabel

evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sesuai format yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dalam masa RPJMD Tahun 2025-2029 sampai dengan bulan Juni 2026. Untuk evaluasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat disampaikan sebagai berikut :

1. **Urusan Wajib Tenaga Kerja**

   Terdiri dari 4 program, 10 kegiatan dengan 26 sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.276.752.855,- terealisasi sebesar Rp. 2.194.160.549,- atau 41,58%.

2. **Ursuan Pilihan Perindustrian**

   Terdiri dari 3 program, 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 511.502.941,- terealisasi sebesar Rp. 146.839.082,- atau 28,71%.

3. **UPTD P3R Sentra Randang**

   Terdiri dari 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 179.635.322,- terealisasi sebesar Rp. 24.406.801,- atau 13,59%.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 sebanyak 7 program, 13 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 5.967.891.118,- dan realisasinya sampai dengan bulan Juni 2026 sebesar Rp. 2.365.406.432,- atau 39,64%. Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Pencapaian Renstra Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**46.845.532.405**		**4.515.805.613**		**5.276.752.855**		**987.317.976**		**1.206.842.573**						**2.194.160.549**		**2.194.160.549**	**22,44**	**4,68**		
		2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**31.861.499.363**		**3.677.206.359**		**4.238.402.090**		**806.232.995**		**984.620.678**						**1.790.853.673**		**1.790.853.673**	**25,1**	**5,62**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM (Indeks)	93,7		0		92,50		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.021.906.498		86.406.981		79.219.950		10.099.550		26.082.099						36.181.649		36.181.649	37,5	3,54		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		4		1		1						1		1		25	0		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12		12		12		3		3						3		3		25	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0	0		
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	104		0		104		0		104						104		104		100	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggu ngjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				(Data)																						
		2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			196.933.326		24.990.201		15.109.650		782.550		8.923.599						9.706.149		9.706.149	25	4,93		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		4		1		1						1		1		25	0		
		2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			450.118.372		61.416.780		59.255.500		8.750.000		16.591.500						25.341.500		25.341.500	25	5,63		
			Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12		12		12		3		3						3		3		25	0		
		2.07.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			173.244.800		-		3.244.800		567.000		-						567.000		567.000	0	0,33		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			201.610.000		-		1.610.000		-		567.000						567.000		567.000	100	0,28		
			Terlaksanya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	104		0		104		0		104						104		104		100	0		
		2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.126.093.358		2.248.551.152		3.153.760.700		679.492.282		772.457.051						1.451.949.333		1.451.949.333	48,08	7,21		
			Persentase penyelesaian administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		20		25		25		25						25		25		96,15	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			perangkat daerah tepat waktu																							
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.723.228.799		2.059.179.152		2.892.702.100		643.707.282		711.982.051						1.355.689.333		1.355.689.333	96,15	7,24		
			Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		20		25		25		25						25		25		96,15	0		
		2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.402.864.559		189.372.000		261.058.600		35.785.000		60.475.000						96.260.000		96.260.000	0	6,86		
			Tersediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			271.476.920		30.095.511		-		-		-						-		-	0	0		
			Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	26		46		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			271.476.920		30.095.511		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersediannya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	26		46		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.914.526.383		358.864.793		134.137.280		15.207.485		25.526.525						40.734.010		40.734.010	24,42	1,4		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggu ngjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		6		0		6						6		6		120	0		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		8		0		0		0						0		0		0	0		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	38		17		9		0		0						0		0		0	0		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	55		63		53		15		30						30		30		54,55	0		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7		9		3		2		2						2		2		28,57	0		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		2		2		0		0						0		0		0	0		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30		20		15		5		5						5		5		16,67	0		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			32.656.176		4.794.645		5.088.500		-		4.849.035						4.849.035		4.849.035	120	14,85		
			Tersediany a Kompone n Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		5		6		0		6						6		6		120	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggu ngjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Kantor																							
		2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			174.552.038		34.880.640		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		8		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			435.731.614		180.330.600		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	38		17		9		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			229.755.722		32.362.883		28.469.480		3.552.500		9.029.690						12.582.190		12.582.190	54,55	5,48		
			Tersediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	55		63		53		15		30						30		30		54,55	0		
		2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			134.735.075		15.684.744		14.619.600		632.700		3.728.135						4.360.835		4.360.835	28,57	3,24		
			Tersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7		9		3		2		2						2		2		28,57	0		
		2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			50.684.813		3.000.000		5.966.300		-		945.000						945.000		945.000	0	1,86		
			Tersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		2		2		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			77.152.898		2.758.490		2.464.400		-		1.753.165						1.753.165		1.753.165	0	2,27		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggu ngjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksanaanya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.637.208.047		85.052.791		75.919.000		11.022.285		4.465.500						15.487.785		15.487.785	16,67	0,95		
			Terlaksanaanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30		20		15		5		5						5		5		16,67	0		
		2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			142.050.000		-		1.610.000		-		756.000						756.000		756.000	0	0,53		
			Terlaksanaanya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.901.360.100		392.194.499		-		-		-						-		-	0	0		
			Persentase ketersediaan BMD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0	0		
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		3		0		0		0						0		0		0	0		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0	0		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13		23		0		0		0						0		0		0	0		
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggu ngjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			10.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			785.677.000		106.920.001		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		3		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			232.050.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			773.633.100		285.274.498		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13		23		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.757.054.030		214.937.252		683.215.000		87.947.126		131.786.673						219.733.799		219.733.799	12,5	5,85		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggu ngjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		3		0		0						0		0		0	0		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						3		3		25	0		
		2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.173.803.843		103.628.469		180.903.900		25.124.524		24.870.741						49.995.265		49.995.265	0	4,26		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		3		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.583.250.187		111.308.783		502.311.100		62.822.602		106.915.932						169.738.534		169.738.534	25	6,57		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						3		3		25	0		
		2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.869.082.074		346.156.171		188.069.160		13.486.552		28.768.330						42.254.882		42.254.882	42,36	2,26		
			Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		1		100	0		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16		14		17		17		17						17		17		106,3	0		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12		21		0		0		0						0		0		0	0		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	54		37		33		1		3						3		3		5,56	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggu ngjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			332.754.015		38.737.966		39.190.000		4.277.952		7.971.900						12.249.852		12.249.852	100	3,68		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		1		1		1						1		1		100	0		
		2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			522.596.560		67.284.766		85.600.000		8.920.000		18.258.880						27.178.880		27.178.880	106,3	5,2		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16		14		17		17		17						17		17		106,3	0		
		2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			207.139.278		35.000.000		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	12		21		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			258.420.190		23.857.300		23.279.160		288.600		2.537.550						2.826.150		2.826.150	5,56	1,09		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	54		37		33		1		3						3		3		5,56	0		
		2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			548.172.031		181.276.139		40.000.000		-		-						-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		
		2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**450.066.920**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**		**-**	**0**	**0**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang tersedia (%)	75		0		25		0		0						0		0		0	0		
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			450.066.920		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0	0		
				Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	60		0		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			380.027.320		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0	0		
		2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			70.039.600		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	60		0		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**8.003.656.556**		**730.856.801**		**255.299.765**		**3.589.842**		**182.313.173**						**185.903.015**		**185.903.015**	**21,43**	**2,32**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	3,9		13,8		3,87		0		3,76						3,76		3,76		96,41	0		
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			7.845.484.231		710.518.871		253.229.465		3.589.842		182.313.173						185.903.015		185.903.015	42,86	2,37		
			Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	112		192		48		0		48						48		48		42,86	0		
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			7.845.484.231		710.518.871		253.229.465		3.589.842		182.313.173						185.903.015		185.903.015	42,86	2,37		
			Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	112		192		48		0		48						48		48		42,86	0		
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			158.172.325		20.337.930		2.070.300		-		-						-		-	0	0		
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	12		12		12		0		0						0		0		0	0		
		2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			158.172.325		20.337.930		2.070.300		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	12		12		12		0		0						0		0		0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggu ngjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**1.501.359.798**		**87.525.495**		**93.109.550**		**14.079.057**		**12.490.708**						**26.569.765**		**26.569.765**	**19,33**	**1,77**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	17,53		17,46		16,73		1,56		9,52						9,52		9,52		54,31	0		
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			487.509.000		28.048.471		26.610.250		-		-						-		-	0	0		
			Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	200		125		125		0		0						0		0		0	0		
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			487.509.000		28.048.471		26.610.250		-		-						-		-	0	0		
			Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	200		125		125		0		0						0		0		0	0		
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			1.013.850.798		59.477.024		66.499.300		14.079.057		12.490.708						26.569.765		26.569.765	29	2,62		
			Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	150		252		150		32		87						87		87		58	0		
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	30		0		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			302.969.525		59.477.024		66.499.300		14.079.057		12.490.708						26.569.765		26.569.765	58	8,77		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	150		252		150		32		87						87		87		58	0		
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			710.881.273		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksanaanya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	30		0		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**5.028.949.768**		**20.216.958**		**689.941.450**		**163.416.082**		**27.418.014**						**190.834.096**		**190.834.096**	**14,29**	**3,79**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	7.420		3.256		1444		0		3256						3.256		3.256		43,88	0		
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			35.439.233		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Persentase Perusahaaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2		0		0		0		0						0		0		0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggung jawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2		0		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			17.719.617		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2		0		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan			17.719.616		-		-		-		-						-		-	0	0		
			Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2		0		0		0		0						0		0		0	0		
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			4.993.510.535		20.216.958		689.941.450		163.416.082		27.418.014						190.834.096		190.834.096	23,81	3,82		
			Persentase Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	7		7		7		1		5						5		5		71,43	0		
				Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	3		2		3		1		0						0		0		0	0		
				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	3750		0		3156		3.156		0						0		0		0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			128.116.585		16.521.372		24.591.100		910.150		18.626.273						19.536.423		19.536.423	71,43	15,25		
			Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	7		7		7		1		5						5		5		71,43	0		
		2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			21.004.200		3.695.586		4.200.600		983.028		378.000						1.361.028		1.361.028	0	6,48		
			Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	3		2		3		1		0						0		0		0	0		
		2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			4.844.389.750		-		661.149.750		161.522.904		8.413.741						169.936.645		169.936.645	0	3,51		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terlaksanany a Pengembang an Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraa n Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	3750		0		315 6		3.156		0						0		0		0	0		
		3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**9.940.241.215**		**1.198.378.60 9**		**691.138.2 63**		**30.444.459**		**140.801.424**						**171.245.883**		**171.245.883**	**0**	**1,72**		
		3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**4.900.008.626**		**627.119.172**		**452.384.3 16**		**20.374.276**		**118.687.955**						**139.062.231**		**139.062.231**	**0**	**2,84**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri an	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	30		41,1 6		26		15		15,0 7						1 5 , 0 7		15, 07		50,23	0		
		3.31.02.2. 01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			4.900.008.626		627.119.172		452.384.3 16		20.374.276		118.687.955						139.062.231		139.062.231	0	2,84		
			Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan	1		1		1		0		0						0		0		0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggu ngjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Perwilayahan Industri (Dokumen)																						
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		
				- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0		
		3.31.02.2. 01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			243.883.775		19.612.225		8.581.100		-		2.105.714						2.105.714		2.105.714	0	0,86		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Industri																							
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			1.550.723.386		261.249.322		122.336.867		-		64.783.050						64.783.050		64.783.050	0	4,18		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			3.022.258.915		338.305.459		317.134.349		20.374.276		47.763.272						68.137.548		68.137.548	0	2,25		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		
		3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota			83.142.550		7.952.166		4.332.000		-		4.035.919						4.035.919		4.035.919	0	4,85		
			Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0		
		3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**531.972.650**		**53.814.162**		**52.342.225**		**-**		**6.796.998**						**6.796.998**		**6.796.998**	**0**	**1,28**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggu ngjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	73,52		83,45		72,57		0		0						0		0		0	0		
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			531.972.650		53.814.162		52.342.225		-		6.796.998						6.796.998		6.796.998	0	1,28		
			Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		
				Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha	1		0		1		0		0						0		0		0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggu ngjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)																						
		3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			128.846.910		7.958.919		7.263.950		-		3.902.010						3.902.010		3.902.010	0	3,03		
			Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		
		3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)			403.125.740		45.855.243		45.078.275		-		2.894.988						2.894.988		2.894.988	0	0,72		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggu ngjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0	0		
		3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**213.322.100**		**14.301.072**		**6.776.400**		**-**		**979.853**						**979.853**		**979.853**	**0**	**0,46**	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	73,33		60		61,67		15,03		45						45		45		61,37	0		
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			213.322.100		14.301.072		6.776.400		-		979.853						979.853		979.853	0	0,46		
			Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem	5		1		1		0		0						0		0		0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggu ngjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
				Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)																						
				Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		
		3.31.04.2.01.0001		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		81.416.745		5.842.818		3.183.800		-		464.868						464.868		464.868	0	0,57		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggu ngjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0	0		
		3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			131.905.355		8.458.254		3.592.600		-		514.985						514.985		514.985	0	0,39		
			Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/K	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			ota dalam Penyampaian Data ke SIINas																							
		3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**4.294.937.839**		**503.144.203**		**179.635.322**		**10.070.183**		**14.336.618**						**24.406.801**		**24.406.801**	**0**	**0,57**	UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	30		41,16		26		15		15,07						15,07		15,07		50,23	0		
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			4.294.937.839		503.144.203		179.635.322		10.070.183		14.336.618						24.406.801		24.406.801	0	0,57		
			Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			753.252.750		-		63.252.550		-		-						-		-	0	0		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0	0		
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			3.541.685.089		503.144.203		116.382.772		10.070.183		14.336.618						24.406.801		24.406.801	0	0,69		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1		1		1		0		0						0		0		0	0		
																							0	0		
			JUMLAH			**56.785.773.620**		**5.714.184.222**		**5.967.891.118**		**1.017.762.435**		**1.347.643.997**						**2.365.406.432**		**2.365.406.432**				
			Rata-rata capaian kinerja (%)																				**17,86**	**4,17**		
			Predikat kinerja																				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian :
1. Kegiatan terlaksana dengan baik dan efektif
2. Meningkatnya kapasitas SDM penatausahaan keuangan

UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) :
1. Kegiatan terlaksana dengan baik dan efektif
2. Meningkatnya kapasitas SDM penatausahaan keuangan

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		SKPD Unit Penanggu ngjawab	Ket
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%		16	17
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		

Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	# Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian : 1. Anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan-pelatihan 2. Sarana dan prasarana yang belum memadai # UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) : 1. Anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan-pelatihan 2. Sarana dan prasarana yang belum memadai
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	# Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian : Meningkatkan sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk pelayanan # UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) : Meningkatkan sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk pelayanan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya	:	# Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian : 1. Mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan pelatihan-pelatihan pada urusan bidang Naker dan Perindustrian 2. Mengusulkan penambahan anggaran untuk sarana prasarana # UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R) : 1. Mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan pelatihan-pelatihan pada urusan bidang Naker dan Perindustrian 2. Mengusulkan penambahan anggaran untuk sarana prasarana

Berdasarkan tabel diatas, ada 26 sub kegiatan yang tingkat realisasinya dibawah 45% sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 59.255.500,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 25.341.500,- atau 42,77%.

   Permasalahan :

   Sebagian tahapan evaluasi dan penyusunan laporan belum selesai sehingga pembayaran belanja belum dapat direalisasikan.

   Upaya yang telah/akan dilakukan :

   Mempercepat penyelesaian dokumen evaluasi, penjadwalan rapat, dan proses administrasi pencairan belanja.

2. Sub Kegiatan Penyelenggarakan Walidata Pendukung Data Statistik Sektoral Daerah

   Sub Kegiatan Penyelenggarakan Walidata Pendukung Data Statistik Sektoral Daerah dengan anggaran Rp. 3.244.800,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 567.000,- atau 17,47%.

   Permasalahan :

   Pengumpulan dan validasi data sektoral dari perangkat daerah belum seluruhnya selesai.

   Upaya yang telah /akan dilakukan :

   Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan menetapkan jadwal penyampaian data secara berkala.

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

   Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dengan anggaran Rp. 1.610.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 567.000,- atau 35,22%.

   Permasalahan :

   Pelaksanaan pengumpulan data masih bertahap sesuai jadwal kegiatan.

Upaya yang telah /akan dilakukan :

Mempercepat pelaksanaan survei, validasi data, dan penyelesaian administrasi kegiatan.

4. Sub Kegiatan Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

   Sub Kegiatan Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran Rp. 261.058.600,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 96.260.000,- atau 36,87%.

   Permasalahan :

   Pembayaran beberapa komponen belanja ASN dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.

   Upaya yang telah/akan dilakukan :

   Melakukan percepatan proses administrasi pembayaran sesuai ketentuan dan jadwal.

5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

   Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 28.469.480,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 12.582.190,- atau 44,20%.

   Permasalahan :

   Pengadaan logistik disesuaikan dengan kebutuhan riil sehingga belum seluruh anggaran digunakan.

   Upaya yang telah/akan dilakukan :

   Melakukan pengadaan sesuai rencana kebutuhan semester II.

6. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 14.619.600,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 4.360.835,- atau 29,83%.

   Permasalahan :

   Kebutuhan cetak dan penggandaan dokumen masih rendah pada semester I.

   Upaya yang telah/akan dilakukan :

Menyesuaikan kebutuhan cetak dokumen pada semester II dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

   Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 5.966.300,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 945.000,- atau 15,84%.

   Permasalahan :

   Pengadaan bahan bacaan dan regulasi belum seluruhnya dilaksanakan.

   Upaya yang telah/akan dilakukan :

   Melakukan pengadaan sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi terbaru.

8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 75.919.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 15.487.785,- atau 20,40%.

   Permasalahan :

   Sebagian rapat koordinasi dan konsultasi dijadwalkan pada semester II.

   Upaya yang telah/akan dilakukan :

   Mengoptimalkan pelaksanaan rapat sesuai agenda kerja dan mempercepat penyelesaian administrasi pembayaran.

9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 180.903.900,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 49.995.265,- atau 27,64%.

   Permasalahan :

   Pembayaran tagihan dilakukan berdasarkan pemakaian bulanan sehingga realisasi masih rendah.

Upaya yang telah/akan dilakukan :

Melakukan monitoring penggunaan utilitas dan memastikan pembayaran tepat waktu.

10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

    Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 502.311.100,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 169.738.534,- atau 33,79%.

    Permasalahan :

    Belanja jasa pelayanan direalisasikan bertahap sesuai kontrak dan kebutuhan.

    Upaya yang telah/akan dilakukan :

    Memastikan seluruh kontrak berjalan sesuai jadwal dan mempercepat proses pembayaran.

11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

    Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 39.190.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 12.249.852,- atau 31,26%.

    Permasalahan :

    Pemeliharaan kendaraan belum seluruhnya dilaksanakan karena menyesuaikan kondisi kendaraan.

    Upaya yang telah/akan dilakukan :

    Menyusun jadwal pemeliharaan dan pembayaran pajak sesuai rencana kebutuhan.

12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

    Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 85.600.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan

II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 27.178.880,- atau 31,75%.

Permasalahan :

Pemeliharaan berkala kendaraan operasional belum seluruhnya dilaksanakan.

Upaya yang telah/akan dilakukan :

Mempercepat pelaksanaan pemeliharaan dan penyelesaian administrasi pembayaran.

13. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

    Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 23.279.160,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 2.826.150,- atau 12,14%.

    Permasalahan :

    Pemeliharaan peralatan dijadwalkan pada semester II.

    Upaya yang telah/akan dilakukan :

    Melaksanakan pemeliharaan sesuai jadwal dan segera memproses pembayaran.

14. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

    Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 40.000.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 0,- atau 0%.

    Permasalahan :

    Pelaksanaan pekerjaan fisik belum dimulai karena masih tahap persiapan/pengadaan.

    Upaya yang telah/akan dilakukan :

    Mempercepat proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal.

15. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

    Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan anggaran Rp. 2.070.300,- dan realisasi anggaran

sampai dengan Triwulan I (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 0,- atau 0%.

Permasalahan :

Kegiatan pembinaan belum memasuki jadwal pelaksanaan, karena aliran kas berada pada September triwulan III.

Upaya yang telah/akan dilakukan :

Segera melaksanakan pembinaan sesuai kalender kegiatan dan menyelesaikan administrasi pendukung.

16. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

    Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan anggaran Rp. 26.610.250,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 0,- atau 0%.

    Permasalahan :

    Pelaksanaan program masih menunggu jadwal dan kesiapan peserta, karena aliran kas berada pada Agustus triwulan III.

    Upaya yang telah/akan dilakukan :

    Mempercepat persiapan pelaksanaan serta koordinasi dengan pihak terkait.

17. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyedian Informasi Pasar Kerja Online

    Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyedian Informasi Pasar Kerja Online dengan anggaran Rp. 66.499.300,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 26.569.765,- atau 39,95%.

    Permasalahan :

    Sebagian kegiatan pelayanan pasar kerja dilaksanakan bertahap dan gaji P3K Paruh Waktu bulan Juni belum dibayarkan.

    Upaya yang telah/akan dilakukan :

    Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan dan mempercepat realisasi belanja pendukung dan segera di bayarkan gaji di minggu I bulan Juli.

18. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang

Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 4.200.600,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 1.361.028,- atau 32,40%.

Permasalahan :

Jumlah kasus yang ditangani belum sesuai perkiraan sehingga realisasi belanja masih rendah. Perkara perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja sampai bulan Juni hanya masuk 1 perkara dari 3 target perkara.

Upaya yang telah/akan dilakukan :

- Mengoptimalkan fasilitasi penyelesaian perselisihan dan penyelesaian administrasi kegiatan.
- Memberikan sosialisai pada pekerja dan pemberi kerja agar melapor pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian jika terjadi sengketa/perselisihan dalam hubungan kerja

19. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

    Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dengan anggaran Rp. 661.149.750,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 169.936.645,- atau 25,70%.

    Permasalahan :

    Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Juni, Juli dan Agustus belum dibayarkan karena keterlambatan kelurahan dalam mengusulkan nama penerima manfaatnya.

    Upaya yang telah/akan dilakukan :

    Mendesak pihak kelurahan untuk segera mengusulkan nama penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

20. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

    Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dengan anggaran Rp. 8.581.100,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 2.105.714,- atau 24,54%.

    Permasalahan :

    - Kegiatan koordinasi dan pembinaan industri masih berlangsung bertahap.
    - Pertemuan dengan pengurus Sentra dan KUB belum terlaksana.

    Upaya yang telah/akan dilakukan :

    - Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan sesuai jadwal semester II.
    - Menyusun penjadwalan pertemuan untuk pembinaan.

21. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

    Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan anggaran Rp. 317.134.349,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 68.137.548,- atau 21,49%.

    Permasalahan :

    Kegiatan Dekranasda masih banyak yang belum terlaksana.

    Upaya yang telah/akan dilakukan :

    Melakukan pertemuan dengan Ketua Dekranasda Kota Payakumbuh.

22. Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri asional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Sub Kegiatan Base Approach (OSS RBA)

Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri asional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Sub Kegiatan Base Approach (OSS RBA) dengan anggaran Rp. 45.078.275,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 2.894.988,- atau 6,42%.

Permasalahan :

Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Halal dan Merek baru berjalan sekitar 25% dan saat ini masih dalam progress. Selain itu, juga ada SPJ yang masih dalam proses pencairan.

Upaya yang telah/akan dilakukan :

Melaksanakan percepatan dan koordinasi dengan PPH, LPH, dan IKM penerima fasilitasi.

23. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem

    Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem dengan anggaran Rp. 3.183.800,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 464.868,- atau 14,60%.

    Permasalahan :

    Pengumpulan data industri belum seluruhnya diterima dari pelaku usaha.

    Upaya yang telah/akan dilakukan :

    Melakukan pendampingan dan koordinasi agar pelaku industri segera menyampaikan data.

24. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas dengan anggaran Rp. 3.592.600,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 514.985,- atau 14,33%.

Permasalahan :

Kepatuhan perusahaan dalam pelaporan data masih rendah.

Upaya yang telah/akan dilakukan :

Meningkatkan pembinaan, monitoring, dan pendampingan kepada perusahaan industry.

25. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (UPTD P3R)

    Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan anggaran Rp. 63.252.550,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 0,- atau 0%.

    Permasalahan :

    Pada perubahan APBD, sub kegiatan Pembangunan Sumber Daya Industri dihilangkan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak direalisasikan.

    Upaya yang telah/akan dilakukan :

    Melakukan penyesuaian terhadap perubahan APBD, mengoptimalkan pelaksanaan sub kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta menyesuaikan target dan realisasi sesuai kebijakan perubahan anggaran.

26. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (UPTD P3R)

    Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dengan anggaran Rp. 116.382.772,- dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II (Kondisi 30 Juni 2026) sebesar Rp. 24.406.801,- atau 20,97%.

    Permasalahan :

Realisasi anggaran masih rendah karena alokasi anggaran kas lebih banyak direncanakan pada Semester II sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan pada Semester I.

Upaya yang telah/akan dilakukan :

Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan pada Semester II sesuai jadwal anggaran kas serta melakukan percepatan administrasi dan pelaksanaan agar target realisasi dapat tercapai.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029. Analisis ini mencerminkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian, baik dari aspek pelayanan kepada masyarakat maupun dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Kajian terhadap pencapaian pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029.

II.2.1 Capaian IKU, IKD dan IKK Sesuai Renstra Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2026

Analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pelayanan urusan ketenagakerjaan dan perindustrian berdasarkan indikator

kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Analisis dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 serta perkembangan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

A. Capaian IKU Tahun 2025 Sesuai Renstra Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2026

Tabel II.2
Capaian IKU Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Indikator	Target		Realisasi Capaian		Persentase Capaian	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,75%	4,64%	4,96%	-	95,77%	-
2	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	95,25%	95,36%	95,04%	-	99,78%	-
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	70,80 juta rupiah/tenaga kerja	71,5 juta rupiah/tenaga kerja	121,75 juta rupiah/tenaga kerja	12,81 juta rupiah/tenaga kerja	171,96%	17,92%
4	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	6%	6,10%	6,7%	1,8%	111,67%	29,51%
5	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,95%	5,06%	5,2%	-	105,05%	-
6	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	84,50	85	85,15	83,5	100,77%	98,24%

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029. IKU tersebut mencerminkan kinerja utama perangkat daerah dalam mendukung peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, pengembangan sektor industri, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada Tahun 2025, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 4,75%, dengan realisasi sebesar 4,64%, sehingga persentase capaian mencapai 95,77%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berada di bawah target yang ditetapkan, yang secara substantif menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang relatif baik dan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong penyerapan tenaga kerja.

Capaian tersebut perlu dipertahankan melalui peningkatan fasilitasi penempatan tenaga kerja, pengembangan kompetensi pencari kerja, perluasan informasi pasar kerja, serta peningkatan keterhubungan antara kebutuhan dunia usaha dengan kompetensi tenaga kerja.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator Tingkat Pengangguran Terbuka belum tersedia sehingga capaian terhadap target Tahun 2026 belum dapat dihitung. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi karena indikator ini umumnya memerlukan data statistik ketenagakerjaan yang tersedia secara periodik.

2. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja

Persentase Penyerapan Tenaga Kerja pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 95,25% dan terealisasi sebesar 95,04%, dengan persentase capaian sebesar 99,78%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja penyerapan tenaga kerja telah mendekati target yang ditetapkan dalam Renstra.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja, memfasilitasi penempatan tenaga kerja, meningkatkan kompetensi pencari kerja dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator ini belum tersedia sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dengan perusahaan, lembaga penempatan tenaga kerja dan pihak terkait dalam pemutakhiran data penyerapan tenaga kerja.

3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Tahun 2025 memiliki target sebesar Rp70,80 juta per tenaga kerja, sedangkan realisasinya mencapai Rp121,75 juta per tenaga kerja. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 171,96% dari target.

Capaian yang jauh melampaui target tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik pada aspek produktivitas tenaga kerja. Tingginya realisasi mengindikasikan adanya peningkatan nilai tambah yang dihasilkan tenaga kerja serta kontribusi kegiatan peningkatan kompetensi, produktivitas dan pengembangan sektor ekonomi produktif.

Sementara itu, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi tercatat sebesar Rp. 12,81 juta per tenaga kerja, dengan capaian sementara sebesar 17,92% terhadap target tahunan sebesar Rp. 71,50 juta per tenaga kerja. Capaian Triwulan II tersebut belum dapat dijadikan gambaran akhir kinerja Tahun 2026 karena periode pengukuran masih berjalan. Namun demikian, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penguatan produktivitas sektor usaha.

4. Persentase Peningkatan Nilai Produksi

Indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 6%, dengan realisasi sebesar 6,70%, sehingga capaian kinerja mencapai 111,67%. Realisasi yang lebih tinggi dari target menunjukkan bahwa perkembangan nilai produksi sektor yang menjadi sasaran pembinaan telah memberikan hasil positif.

Capaian tersebut perlu dipertahankan melalui peningkatan pembinaan dan pengembangan industri, fasilitasi peningkatan kapasitas produksi, pengembangan kualitas produk, pemanfaatan teknologi, peningkatan akses pasar dan penguatan daya saing industri.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator mencapai 1,80% dari target tahunan sebesar 6,10%, dengan capaian sementara sebesar 29,51%. Capaian tersebut masih berada dalam tahap pelaksanaan dan perlu didorong melalui percepatan program dan kegiatan pengembangan industri serta peningkatan produktivitas pelaku usaha.

5. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 4,95% dan terealisasi sebesar 5,20%, sehingga persentase capaian mencapai 105,05%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor industri telah memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan dalam perencanaan.

Capaian positif tersebut perlu dipertahankan dengan memperkuat pembinaan industri, pengembangan sentra dan kawasan industri, fasilitasi investasi sektor industri, peningkatan nilai tambah produk, serta peningkatan daya saing industri lokal.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator belum tersedia sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung. Kondisi ini memerlukan pemutakhiran data

sektor industri secara berkala agar perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB dapat dipantau secara tepat.

6. Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 84,50, dengan realisasi sebesar 85,15, sehingga capaian kinerja mencapai 100,77%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2026, target nilai evaluasi AKIP ditetapkan sebesar 85, sedangkan sampai dengan Triwulan II realisasi sementara tercatat sebesar 83,5, dengan capaian sebesar 98,24%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas telah mendekati target tahunan, namun masih diperlukan peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta tindak lanjut hasil evaluasi.

Adapun formula penghitungan masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Formula Pengukuran IKU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		
					Defenisi Operasional	Formula/Cara Pengukuran	Sumber Data
1	Menurunnya Pengangguran melalui Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Daya Saing Industri		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu : (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja	$TPT = \frac{PP}{AK} x100\%$ Ket : TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP = Jumlah Pengangguran (orang) PAK = Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Badan Pusat Statistik
2		Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja adalah ukuran yang menunjukkan berapa besar bagian dari Angkatan kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu	PPTK = Jumlah penduduk usia kerja yang bekerja X 100% Jumlah angkatan kerja	Badan Pusat Statistik
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi	PTK = $\frac{PDRB}{JTkB}$ Dimana : PTK = Produktivitas Tenaga Kerja PDRB = PDRB ADHB tahun n	Badan Pusat Statistik

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Tujuan</th><th rowspan="2">Sasaran</th><th rowspan="2">Indikator Kinerja Utama</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="3">Penjelasan</th></tr>
<tr><th>Defenisi Operasional</th><th>Formula/Cara Pengukuran</th><th>Sumber Data</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JTkB = Jumlah Penduduk Bekerja tahun n</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>Meningkatnya Daya Saing Industri</td><td>Persentase Peningkatan Nilai Produksi</td><td>%</td><td>Mengukur jumlah peningkatan nilai produksi dibandingkan dengan kondisi di tahun sebelumnya</td><td>Nilai Produksi Th. N - Nilai Produksi Th. N-1 X 100%
Nilai Produksi Th. N-1</td><td>Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB</td><td>%</td><td>Kontribusi PDRB yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB</td><td>Kontribusi = PDRBindustri pengolahan X 100%
PDRBKota</td><td>Badan Pusat Statistik</td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</td><td>Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat</td><td>Nilai</td><td>Nilai Evaluasi AKIP merupakan Nilai terhadap aktivittas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah</td><td>
<table>
<tr><th>Komponen</th><th>Sub Komponen 1 Keberadaan</th><th>Sub Komponen 2 Kualitas</th><th>Sub Komponen 3 Pemanfaatan</th><th>Total Bobot</th></tr>
<tr><td></td><td>20%</td><td>30%</td><td>50%</td><td></td></tr>
<tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Evaluasi Ekuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Nilai Akuntabilitas</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr>
</table>
</td><td>Inspektorat Kota Payakumbuh</td></tr>
</table>

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan					
					Defenisi Operasional	Formula/Cara Pengukuran				Sumber Data
						Kinerja				

B. Capaian IKD Tahun 2025 Sesuai Renstra Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2026

Tabel II.3
Capaian IKD Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Indikator	Target		Realisasi Capaian		Persentase Capaian	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	31,38%	33,78%	31,90%	25,79%	101,66%	76,35%
2	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	79,67%	79,67%	65,95%	65,95%	82,77%	82,77%
3	Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal	54,38%	54,38%	36,60%	36,60%	67,30%	67,30%
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	64%	64%	43,545	43,54%	68,03%	68,03%
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,02%	71,02%	7,18%	7,18%	10,11%	10,11%
6	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Fasilitasi Layanan Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan /atau dari Dinas yang Menangani Ketenagakerjaan	15 orang	15 orang	0	0	0	0
7	Jumlah Unit Layanan Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kabupaten/Kota	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	100%
8	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja DI Sektor Formal	3,3%	3,3%	2,05%	2,05%	62,16%	62,16%
9	Proporsi Jumlah IKM	3,51%	3,51%	0,25%	0,25%	0,07%	0,07%

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh merupakan indikator yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan selaras dengan arah kebijakan serta sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025–2029. Capaian IKD digunakan untuk melihat kontribusi perangkat daerah dalam peningkatan perlindungan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan partisipasi angkatan kerja, inklusivitas ketenagakerjaan, serta pengembangan sektor industri.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian IKD Tahun 2025 menunjukkan adanya indikator yang telah mencapai atau melampaui target, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target dan memerlukan penguatan pelaksanaan pada tahun berikutnya. Sementara itu, capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 masih bersifat sementara sehingga perlu dilihat sebagai bagian dari proses pencapaian target tahunan.

1. **Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

   Pada Tahun 2025, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditargetkan sebesar 31,38%, dengan realisasi sebesar 31,90%, sehingga mencapai 101,66% dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja telah terlampaui. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran dan akses pekerja terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

   Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, target ditetapkan sebesar 33,78%, dengan realisasi sementara sebesar 25,79% dan persentase capaian sebesar 76,35%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target tahunan masih belum tercapai dan memerlukan percepatan pada semester II Tahun 2026.

   Upaya yang perlu diperkuat antara lain sosialisasi manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, fasilitasi kepesertaan pekerja, peningkatan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta mendorong perusahaan dan pelaku usaha untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerjanya.

2. **Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi**

   Pada Tahun 2025, indikator ini memiliki target sebesar 79,67%, sedangkan realisasi mencapai 65,95%, sehingga persentase capaian sebesar 82,77%. Dengan demikian, target belum tercapai secara optimal. Kondisi tersebut

menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi atau bidang keahlian lulusan pendidikan menengah tinggi dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, target tetap sebesar 79,67%, dengan realisasi sebesar 65,95% dan capaian 82,77%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian masih berada di bawah target dan perlu mendapatkan perhatian melalui peningkatan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Strategi yang perlu dilakukan antara lain memperkuat pemetaan kebutuhan tenaga kerja, meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi, serta memperluas informasi pasar kerja dan fasilitasi penempatan tenaga kerja.

3. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 54,38%, sedangkan realisasi sebesar 36,60%, dengan persentase capaian 67,30%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja formal masih cukup jauh dari target yang ditetapkan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, target sebesar 54,38%, realisasi sebesar 36,60%, dan capaian sebesar 67,30%. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan dan fasilitasi penciptaan kesempatan kerja formal.

Faktor yang perlu diperhatikan antara lain perkembangan investasi, kemampuan dunia usaha dalam melakukan ekspansi, pertumbuhan sektor industri dan sektor ekonomi lainnya, serta kualitas dan kesesuaian tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 64%, dengan realisasi sebesar 43,54%, sehingga capaian kinerja sebesar 68,03%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, target tetap sebesar 64%, sedangkan realisasi sebesar 43,54%, dengan capaian 68,03%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pasar kerja.

Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan akses perempuan terhadap pelatihan kerja, pengembangan kewirausahaan, fasilitasi penempatan kerja, peningkatan akses terhadap informasi pasar kerja serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung partisipasi perempuan.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 71,02%. Berdasarkan data pada dokumen, realisasi tercatat sebesar 7,18% dengan capaian 10,11%. Nilai tersebut menunjukkan capaian yang sangat rendah dibandingkan target sehingga perlu dilakukan verifikasi dan pemutakhiran data untuk memastikan kesesuaian satuan, periode pengukuran, dan metode perhitungan indikator.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, data menunjukkan angka yang sama, yaitu realisasi 7,18% dan capaian 10,11%. Dengan demikian, indikator ini perlu menjadi perhatian khusus dalam evaluasi kinerja, terutama untuk memastikan validitas data sebelum digunakan sebagai dasar penilaian capaian IKD.

Setelah validasi data dilakukan, strategi peningkatan partisipasi angkatan kerja dapat diarahkan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan keterhubungan antara pencari kerja dengan dunia usaha.

6. **Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapat Fasilitasi Layanan Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan**

Indikator jumlah penyandang disabilitas yang mendapat fasilitasi layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan ditargetkan sebanyak 15 orang pada Tahun 2025 dan 2026. Namun, berdasarkan data yang tersedia, realisasi Tahun 2025 maupun sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 masih tercatat 0 orang, sehingga capaian kinerja juga 0%.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan perhatian terhadap penyediaan layanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pendataan penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan, fasilitasi pelatihan dan peningkatan kompetensi, penyediaan informasi lowongan kerja, serta peningkatan koordinasi dengan perusahaan dalam membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

7. **Jumlah Unit Layanan Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kabupaten/Kota**

Jumlah Unit Layanan Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan ditargetkan sebanyak 1 unit pada Tahun 2025 dan 2026. Realisasi Tahun 2025 telah mencapai 1 unit, demikian pula sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 telah tersedia 1 unit, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa target penyediaan unit layanan disabilitas telah terpenuhi. Keberadaan unit layanan tersebut perlu terus diperkuat dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, mekanisme pelayanan serta jejaring dengan dunia usaha agar tidak hanya memenuhi target kuantitatif tetapi juga memberikan layanan yang efektif bagi penyandang disabilitas.

8. **Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal**

Pada Tahun 2025, Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal ditargetkan sebesar 3,30%, dengan realisasi sebesar 2,05%, sehingga capaian sebesar 62,16%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kesempatan penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor formal masih perlu ditingkatkan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, target sebesar 3,30%, realisasi sebesar 2,05%, dan capaian sebesar 62,16%. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di sektor formal.

Penguatan yang diperlukan antara lain peningkatan kompetensi penyandang disabilitas, fasilitasi penempatan kerja, sosialisasi kepada perusahaan mengenai kesempatan kerja inklusif, serta peningkatan koordinasi dalam penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas.

9. Proporsi Jumlah IKM

Proporsi Jumlah IKM pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,51%, dengan realisasi sebesar 0,25% dan persentase capaian tercatat sebesar 0,07%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, target sebesar 3,51%, realisasi sebesar 0,25%, dan capaian sebesar 0,07%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator Proporsi Jumlah IKM masih sangat jauh dari target sehingga membutuhkan perhatian dan strategi penguatan sektor industri kecil dan menengah secara lebih intensif. Upaya dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku IKM, pengembangan produk, peningkatan kualitas dan standardisasi, pemanfaatan teknologi, fasilitasi pemasaran, penguatan akses pembiayaan serta perluasan jaringan usaha.

C. Capaian IKK Tahun 2025 Sesuai Renstra Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2026

Tabel II.4

Capaian IKK Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Indikator	Target		Realisasi Capaian		Persentase Capaian	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	70,80 juta rupiah/tenaga kerja	71,5 juta rupiah/tenaga kerja	121,75 juta rupiah/tenaga kerja	12,81 juta rupiah/tenaga kerja	171,96%	17,92%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	3,87%	3,87%	13,80%	3,76%	356,59%	97,12%
3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	50,00%	50,79%	48,44%	48,44%	96,88%	95,37%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	16,53%	16,73%	18,65%	9,52%	112,83%	56,93%
6	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	60%	61,67%	60%	15,00%	100%	24,32%
7	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait	13,5%	13,7	13,68%	-	101,33%	-
8	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang di tetapkan dalam RPIK	69%	70	107%	47	155,07%	67,14%
9	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	2,50%	3	54,60%	4,92	2.184%	164,00%

No	Indikator	Target		Realisasi Capaian		Persentase Capaian	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026
10	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	-	0	-

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh merupakan salah satu instrumen pengukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian. Capaian IKK menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025–2029 serta mengidentifikasi indikator yang telah mencapai target maupun indikator yang masih memerlukan percepatan.

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025, secara umum capaian IKK menunjukkan kinerja yang cukup baik. Beberapa indikator bahkan telah melampaui target, khususnya indikator produktivitas tenaga kerja, tenaga kerja bersertifikat kompetensi, kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja, pencapaian sasaran pembangunan industri, serta pertambahan jumlah IKM. Sementara itu, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, sebagian indikator masih berada pada tahap pelaksanaan sehingga capaian sementara belum menggambarkan capaian akhir tahun.

1. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Pada Tahun 2025, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja ditargetkan sebesar Rp. 70,80 juta per tenaga kerja, dengan realisasi sebesar Rp. 121,75 juta per tenaga kerja. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 171,96%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja telah melampaui target Renstra secara signifikan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, target ditetapkan sebesar Rp. 71,50 juta per tenaga kerja, dengan

realisasi sementara sebesar Rp. 12,81 juta per tenaga kerja dan capaian sebesar 17,92%. Rendahnya capaian sementara tersebut perlu dilihat dalam konteks periode pengukuran yang baru sampai semester pertama, sehingga masih diperlukan percepatan pelaksanaan program peningkatan produktivitas tenaga kerja pada semester II.

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,87%, sedangkan realisasi mencapai 13,80%, dengan capaian kinerja sebesar 356,59%. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik dan jauh melampaui target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2026, target tetap sebesar 3,87%. Sampai dengan Triwulan II, realisasi sementara mencapai 3,76%, sehingga persentase capaian telah mencapai 97,12%. Dengan capaian tersebut, indikator ini berada sangat dekat dengan target tahunan dan berpotensi mencapai bahkan melampaui target pada akhir Tahun 2026 apabila pelaksanaan sertifikasi kompetensi terus dipertahankan.

3. Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu pada Rencana Tenaga Kerja

Indikator Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu pada Rencana Tenaga Kerja pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, target sebesar 100% juga telah terealisasi 100%, dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah konsisten mengacu pada rencana tenaga kerja yang ditetapkan. Capaian tersebut merupakan indikator positif dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan tenaga kerja dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

4. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, yang meliputi PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah serta terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 50,00% dengan realisasi 48,44%, sehingga capaian sebesar 96,88%.

Pada Tahun 2026 target ditetapkan sebesar 50,79%, sedangkan sampai dengan Triwulan II realisasi tercatat 48,44%, dengan capaian 95,37%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator sudah mendekati target dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan melalui pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, fasilitasi hubungan industrial, serta peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan.

5. **Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja**

Pada Tahun 2025, indikator Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota ditargetkan sebesar 16,53%, dengan realisasi sebesar 18,65%, sehingga capaian mencapai 112,83%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi penempatan tenaga kerja telah berjalan dengan baik dan mampu melampaui target. Hal ini mencerminkan adanya efektivitas layanan antar kerja dalam mempertemukan pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia.

Sementara itu, pada Tahun 2026 target ditetapkan sebesar 16,73%. Sampai dengan Triwulan II, realisasi mencapai 9,52%, dengan capaian sementara 56,93%. Capaian tersebut masih memberikan ruang untuk peningkatan pada semester II melalui perluasan informasi lowongan kerja, job matching, bursa kerja, serta peningkatan kerja sama dengan perusahaan dan lembaga penempatan tenaga kerja.

6. **Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini**

Pada Tahun 2025, indikator ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini ditargetkan sebesar 60%, dengan realisasi sebesar 60%, sehingga capaian mencapai 100%.

Untuk Tahun 2026 target meningkat menjadi 61,67%. Sampai dengan Triwulan II, realisasi tercatat sebesar 15%, dengan capaian sementara 24,32%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemutakhiran dan penyediaan informasi industri masih perlu dipercepat melalui pendataan, verifikasi dan validasi data industri secara berkelanjutan.

7. **Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan terhadap Izin Usaha Industri**

Pada Tahun 2025, indikator persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dibandingkan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dilakukan oleh instansi terkait ditargetkan sebesar 13,5%, dengan realisasi sebesar 13,68% dan capaian sebesar 101,33%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemantauan dan pengawasan telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target. Untuk Tahun 2026, target ditetapkan sebesar 13,7%, namun sampai dengan Triwulan II belum terdapat realisasi dalam data yang tersedia. Oleh karena itu, capaian indikator belum dapat dinilai dan perlu dilakukan pemutakhiran data hasil pemantauan dan pengawasan.

8. **Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri**

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri, termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK, pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 69%, sedangkan realisasi mencapai 107%, sehingga capaian kinerja sebesar 155,07%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan industri pada Tahun 2025 telah memberikan hasil yang sangat baik dibandingkan target yang ditetapkan. Namun, pada Tahun 2026 target meningkat menjadi 70%, sedangkan sampai dengan Triwulan II realisasi sementara sebesar 47%, dengan capaian 67,14%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan dan percepatan pelaksanaan pembangunan industri pada semester II.

9. Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota

Indikator Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,50%, dengan realisasi sebesar 54,60%, sehingga capaian mencapai 2.184%. Capaian yang sangat tinggi tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah IKM yang jauh melampaui target.

Pada Tahun 2026 target ditetapkan sebesar 3%, sedangkan sampai dengan Triwulan II realisasi tercatat sebesar 4,92%, sehingga capaian sementara mencapai 164%. Artinya, target tahunan telah terlampaui pada semester pertama. Kondisi tersebut menjadi faktor positif dalam pencapaian sasaran pengembangan sektor industri, meskipun tetap perlu dilakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan konsistensi metode pengukuran antara target dan realisasi.

10. Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan terhadap Izin Perluasan Industri

Pada Tahun 2025, indikator persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dibandingkan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait memiliki target 0, dengan realisasi 0 dan capaian 0.

Pada Tahun 2026 target juga sebesar 0, sementara sampai dengan Triwulan II belum terdapat realisasi. Karena

target indikator ditetapkan 0, indikator ini tidak dapat ditafsirkan sebagai kinerja yang rendah semata-mata berdasarkan persentase capaian. Penilaian perlu mempertimbangkan keberadaan atau tidak adanya izin perluasan industri yang menjadi objek pemantauan dan pengawasan selama periode tersebut.

Tabel II.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU/IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Persentase Capaian	
					2025	2026	2025	2026*	2025	2026*
1	Tingkat pengangguran terbuka		IKU	%	4,75	4,64	4,96	-	95,77	-
2	Persentase penyerapan tenaga kerja		IKU	%	95,25	95,36	95,04	-	99,78	-
3	Tingkat produktivitas Tenaga Kerja		IKU/IKK	juta rupiah/tenaga kerja	70,8	71,5	121,75	12,81	171,96	17,92
4	Persentase peningkatan nilai produksi		IKU	%	6	6,1	6.7	1,8	111,67	29,51
5	Kontribusi sektor industry terhadap PDRB		IKU	%	4,95	5,06	5,2	-	105,05	-
6	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat		IKU	nilai	84,5	85	85,15	83,5	100,77	98,24
7	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi		IKK	%	3,87	3,87	13,80	3,76	356,59	97,12
8	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		IKK	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		IKK	%	50,00	50,79	48,44	48,44	96,88	95,37
10	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota		IKK	%	16,53	16,73	18,65	9,52	112,83	56,93
11	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini		IKK	%	60	61,67	60	15,00	100	24,32
12	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait		IKK	%	13,5	13,7	13,68	-	101,33	-
13	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk		IKK	%	69	70	107	47	155,07	67,14

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU/IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Persentase Capaian	
					2025	2026	2025	2026*	2025	2026*
	turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang di tetapkan dalam RPIK									
14	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota		IKK	%	2,50	3	54,60	4,92	2.184	164,00
15	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		IKK	%	0	0	0	-	0	-

II.2.2Faktor penghambat/ pendorong ketercapaian target IKU, IKD dan IKK

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, secara umum pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan tetap berada dalam koridor pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025–2029. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang realisasinya belum optimal dan memerlukan penguatan pada periode berikutnya.

A. Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target IKU, IKD dan IKK antara lain :

1. Keterbatasan ketersediaan dan kualitas data kinerja.

   Sebagian indikator membutuhkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, sehingga proses pengumpulan, verifikasi, validasi dan pemutakhiran data membutuhkan waktu. Kondisi ini dapat menyebabkan realisasi indikator pada periode tertentu belum dapat menggambarkan capaian secara optimal.

2. Realisasi indikator dipengaruhi oleh faktor eksternal.

   Beberapa indikator bidang ketenagakerjaan dan perindustrian sangat dipengaruhi oleh kondisi

perekonomian, perkembangan dunia usaha dan industri, tingkat investasi, kondisi pasar kerja, serta kemampuan dan partisipasi masyarakat. Faktor tersebut berada di luar kendali langsung perangkat daerah.

3. Belum optimalnya penyerapan anggaran pada awal tahun pelaksanaan kegiatan.

   Pelaksanaan sebagian kegiatan masih mengikuti tahapan perencanaan, pengadaan, koordinasi, persiapan teknis dan penjadwalan dengan pihak terkait. Hal tersebut menyebabkan realisasi keuangan dan output kegiatan pada Triwulan I dan sebagian Triwulan II belum sepenuhnya proporsional terhadap target tahunan.

4. Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan.

   Ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas dan jangkauan pelaksanaan program, khususnya kegiatan yang membutuhkan pendampingan, fasilitasi, pembinaan dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

5. Kondisi pasar kerja yang dinamis.

   Pencapaian indikator ketenagakerjaan dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan tenaga kerja, kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan. Ketidaksesuaian tersebut dapat mempengaruhi pencapaian indikator penempatan maupun peningkatan kompetensi tenaga kerja.

6. Belum optimalnya pengembangan dan daya saing pelaku industri.

   Sebagian pelaku industri masih menghadapi kendala dalam aspek permodalan, teknologi, kualitas produk, pemasaran, legalitas, standardisasi dan akses pasar. Kondisi ini dapat mempengaruhi pencapaian indikator

pembangunan sektor industri dan peningkatan investasi sektor industri.

7. Pelaksanaan beberapa indikator bersifat kumulatif atau hasilnya baru dapat dihitung pada periode tertentu.

   Beberapa target IKU, IKD dan IKK baru dapat diukur secara lebih komprehensif setelah seluruh kegiatan dan proses pendataan dalam satu tahun berjalan selesai. Oleh karena itu, capaian sampai dengan Triwulan II belum selalu mencerminkan capaian akhir tahun.

B. Faktor Pendorong

Di samping faktor penghambat tersebut, terdapat sejumlah faktor yang mendukung pencapaian target IKU, IKD dan IKK, yaitu :

1. Adanya Renstra Disnakerperin Tahun 2025–2029 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan.

   Renstra memberikan arah, sasaran, indikator dan target kinerja yang menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan sehingga pelaksanaan pelayanan dapat lebih terarah dan terukur.

2. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam pencapaian target kinerja.

   Dukungan pimpinan serta koordinasi antarbidang menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai target dan mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

3. Dukungan anggaran dan program yang selaras dengan sasaran strategis.

   Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran bidang ketenagakerjaan dan perindustrian, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kerja, produktivitas, pelayanan ketenagakerjaan, pengembangan industri dan penyediaan data/informasi industri.

4. Koordinasi dan sinergi dengan stakeholder.

   Kerja sama dengan dunia usaha dan industri, lembaga pelatihan, pemerintah daerah, instansi terkait, asosiasi serta masyarakat menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan program, terutama dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan pengembangan industri.

5. Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan data.

   Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan pelayanan mendukung peningkatan kecepatan, ketepatan dan akurasi informasi yang diperlukan dalam pengukuran kinerja serta pengambilan kebijakan.

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

   Monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator secara periodik memungkinkan perangkat daerah mengidentifikasi indikator yang belum mencapai target, mengetahui permasalahan yang dihadapi serta melakukan langkah korektif dan percepatan pada periode berikutnya.

7. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

   Kebijakan dan program pemerintah pada bidang ketenagakerjaan dan perindustrian memberikan landasan serta dukungan bagi daerah dalam melaksanakan pelayanan, pembinaan, pelatihan, pengembangan industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja serta pelaku industri.

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Perubahan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026,

perkembangan kondisi strategis daerah, serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah menunjukkan perkembangan yang baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target sehingga memerlukan penyesuaian strategi pelaksanaan program pada semester II Tahun 2026.

1. **Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026**

   Secara umum, kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 berada pada kategori cukup baik. Beberapa indikator telah mencapai bahkan melampaui target, antara lain Persentase Kegiatan Mengacu pada Rencana Tenaga Kerja (100%), Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (100%), serta Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang telah melampaui target tahunan.

   Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus karena realisasinya belum sesuai target, antara lain :

   - Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.
   - Persentase Penempatan Tenaga Kerja.
   - Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak.
   - Tersedianya Informasi Industri yang Lengkap, Akurat, dan Terkini.
   - Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri (RPIK).
   - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
   - Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal.
   - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
   - Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal.

- Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang masih rendah akibat proses validasi data.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan Disnakerperin masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan, serta memperkuat pengembangan sektor industri kecil dan menengah.

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 meliputi :

- Kesempatan kerja formal masih terbatas sehingga penempatan tenaga kerja belum optimal.
- Kompetensi pencari kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- Produktivitas tenaga kerja masih rendah dan memerlukan peningkatan melalui pelatihan berbasis kompetensi.
- Kepatuhan sebagian perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, penyusunan Peraturan Perusahaan, Struktur dan Skala Upah, serta pembentukan LKS Bipartit masih belum optimal.
- Pendataan, verifikasi, dan validasi data industri serta data ketenagakerjaan masih berlangsung sehingga beberapa indikator belum dapat diukur secara optimal.
- Masih rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja formal.
- Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Ketergantungan terhadap data statistik dari instansi lain (terutama BPS dan BPJS Ketenagakerjaan) menyebabkan

beberapa indikator baru dapat diukur setelah data resmi diterbitkan.

3. Dampak terhadap Pencapaian RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029 dan Program Nasional

Apabila permasalahan tersebut tidak segera ditangani, akan berdampak terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, antara lain :

- Belum optimalnya pencapaian indikator RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029 pada urusan ketenagakerjaan dan perindustrian.
- Melambatnya peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran.
- Belum optimalnya peningkatan daya saing industri kecil dan menengah.
- Terhambatnya pencapaian target pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- Belum optimalnya dukungan terhadap prioritas nasional, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, transformasi ekonomi, dan penguatan sektor industri.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

- Perubahan kebutuhan kompetensi tenaga kerja akibat perkembangan teknologi dan transformasi digital.
- Persaingan tenaga kerja yang semakin kompetitif.
- Terbatasnya peluang kerja formal dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja.
- Dinamika kondisi ekonomi nasional dan global yang memengaruhi pertumbuhan industri.
- Rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap regulasi ketenagakerjaan.
- Keterbatasan kualitas dan integrasi data ketenagakerjaan serta industri.

Peluang

- Meningkatnya dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan SDM melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi.
- Pengembangan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, lembaga pelatihan kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan ketenagakerjaan dan pengelolaan data industri.
- Potensi pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui pembinaan, digitalisasi, promosi produk, dan akses pembiayaan.
- Meningkatnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan tata kelola ketenagakerjaan yang lebih baik.
- Pelaksanaan kebijakan nasional mengenai transformasi ekonomi dan penguatan industri yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dinamika kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang berkembang selama tahun anggaran berjalan. Penelaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan sebagai dasar penyesuaian target kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, serta alokasi anggaran agar tetap selaras dengan arah pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan target kinerja kementerian teknis.

1. Arah Kebijakan pada Perubahan APBN Tahun 2026

   Perubahan APBN Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, memperkuat kualitas belanja yang berorientasi pada hasil (performance based budgeting), serta mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kebijakan tersebut difokuskan pada :

   - Penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
   - Peningkatan produktivitas dan daya saing industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM).
   - Penguatan perlindungan pekerja dan hubungan industrial yang harmonis.
   - Penguatan reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
   - Efisiensi belanja daerah melalui penyesuaian kegiatan yang kurang prioritas dan optimalisasi program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

   Kebijakan tersebut menjadi dasar dalam penyesuaian pagu anggaran pada Perubahan Renja Tahun 2026, baik berupa pengurangan maupun penambahan anggaran pada beberapa

subkegiatan sesuai kebutuhan riil pelaksanaan program. Hal ini tercermin dalam perubahan pagu pada beberapa kegiatan penunjang, pelatihan kerja, hubungan industrial, maupun pengadaan barang milik daerah.

2. Pemutakhiran Target Indikator Kementerian Terkait Tahun 2026

   Perubahan Renja Tahun 2026 juga memperhatikan pemutakhiran target indikator kinerja pada kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan perindustrian, antara lain :

   - Peningkatan persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi.Peningkatan jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan berbasis kompetensi.
   - Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui layanan antar kerja.
   - Peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
   - Penguatan hubungan industrial yang harmonis dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
   - Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah melalui pengembangan industri berbasis potensi daerah.

   Pemutakhiran target tersebut menjadi dasar penyesuaian target indikator kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, serta Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Perubahan Renja Tahun 2026.

3. Telaahan terhadap Perubahan RKP Tahun 2026

   Perubahan RKP Tahun 2026 tetap mengarahkan pembangunan nasional pada peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, transformasi ekonomi, peningkatan produktivitas industri, reformasi birokrasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

   Keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh antara lain diwujudkan melalui :

- Peningkatan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi.
- Perluasan kesempatan kerja dan pelayanan informasi pasar kerja.
- Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
- Pengembangan industri kecil dan menengah yang berdaya saing.
- Penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, statistik sektoral, dan pengelolaan arsip.

4. Telaahan terhadap Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026

   Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026 mengarahkan prioritas pembangunan pada :

   - Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
   - Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM dan industry.
   - Peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran.
   - Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
   - Peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

   Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah diselaraskan dengan prioritas tersebut melalui penyesuaian target kinerja, indikator, serta alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan sehingga tetap mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

5. Kesesuaian dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025–2029 Perubahan Renja Tahun 2026 tetap mengacu pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025–2029. Penyesuaian yang dilakukan pada perubahan Renja hanya berupa penyesuaian target tahunan, indikator, pagu anggaran dan prioritas

pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi semester pertama serta perubahan kebijakan nasional dan daerah.

Dengan demikian, perubahan program dan kegiatan tidak mengubah sasaran strategis maupun tujuan perangkat daerah, tetapi bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sehingga target kinerja Renstra tetap dapat dicapai pada akhir periode perencanaan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan menunjukkan bahwa Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 telah selaras dengan arah kebijakan Perubahan APBN Tahun 2026, Perubahan RKP Tahun 2026, Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026, serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Penyesuaian yang dilakukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja, menjaga konsistensi pencapaian indikator kinerja serta mendukung terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan dan perindustrian yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perkembangan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta hasil penelaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu-isu tersebut meliputi peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, optimalisasi penempatan tenaga kerja, penguatan hubungan industrial dan perlindungan pekerja, peningkatan daya saing industri kecil dan menengah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Perumusan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Tahun 2026 tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029. Dengan demikian, perubahan Renja tidak mengubah tujuan maupun sasaran strategis perangkat daerah, tetapi hanya melakukan penyesuaian target tahunan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, kemampuan keuangan daerah dan perubahan kebijakan pembangunan.

Target tujuan dan sasaran Tahun 2026 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan perkembangan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Oleh karena itu, target Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), maupun indikator kinerja lainnya dapat mengalami penyesuaian, baik meningkat maupun menurun dibandingkan target tahunan dalam Renstra, sepanjang tetap mendukung pencapaian target akhir periode Renstra Tahun 2025–2029.

Arah kebijakan dalam Perubahan Renja Tahun 2026 juga telah diselaraskan dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025–2029, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026, serta kebijakan nasional dan daerah lainnya. Penyesuaian tersebut bertujuan agar pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tetap konsisten dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah, khususnya pada bidang ketenagakerjaan, perindustrian, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing ekonomi daerah.

Tujuan

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 tetap sama dengan tujuan dalam Renstra Tahun 2025–2029, yaitu :

1. Menurunnya pengangguran melalui peningkatan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja serta daya saing industri.

Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Perubahan Renja Tahun 2026 tetap mengacu pada sasaran Renstra Tahun 2025–2029, yaitu :

1. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja.
2. Meningkatnya daya saing industri.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), serta indikator pendukung lainnya sesuai Renstra Perangkat Daerah. Target kinerja Tahun 2026 disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan perkembangan realisasi kinerja Tahun 2026, sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kota Payakumbuh serta target pembangunan nasional.

III.3 Program dan Kegiatan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025–2029, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, serta capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Penyusunan Perubahan Renja juga memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perkembangan kondisi pembangunan daerah, perubahan kemampuan keuangan daerah, kebijakan efisiensi belanja, serta penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2026. Oleh karena itu, beberapa target kinerja dan pagu anggaran mengalami penyesuaian tanpa mengubah tujuan, sasaran, program, maupun arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Perubahan Renja Tahun 2026 meliputi urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, urusan pemerintahan bidang perindustrian, serta program penunjang urusan pemerintahan daerah. Seluruh program telah disusun untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029, sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, serta prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 terinci dalam Tabel III.1

Tabel III.1

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN							**6.731.191.261,00**	**5.967.891.118,00**	**5.967.890.818,00**	**-763.300.443,00**							**7.571.440.512,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.933.963.446,00**	**5.276.752.855,00**	**5.362.865.955,00**	**-571.097.491,00**							**6.694.488.117,00**	
	207	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.933.963.446,00**	**5.276.752.855,00**	**5.362.865.955,00**	**-571.097.491,00**							**6.694.488.117,00**	
1	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**92.50 Indeks**	**92.50 Indeks**	**4.755.942.927,00**	**4.238.402.090,00**	**4.331.103.140,00**	**412.121.297,00**							**5.168.064.224,00**	
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **9.300**	**8.825** **90**	**90** **9.300**	-	-	**4.755.942.927,00**	**4.238.402.090,00**	**4.331.103.140,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **9.300**	**5.168.064.224,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	20.701.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	97.644.400,00	79.219.950,00	79.482.900,00	-18.161.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		110.984.830,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.012.010.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	24.822.800,00	15.109.650,00	15.372.600,00	-9.450.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			32.618.080,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	207.012.010.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	67.966.800,00	59.255.500,00	59.255.500,00	-8.711.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			74.824.750,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**4.755.942.927,00**	**4.238.402.090,00**	**4.331.103.140,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**5.168.064.224,00**	-
	207.012.010.008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.244.800,00	3.244.800,00	3.244.800,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing			1.771.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																berbasis produk unggulan dan inovasi				
	207.012.010.009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				104 Data	104 Data	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			1.771.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM** **Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**90** **9.300**	**8.825** **90**	**90** **9.300**	-	-	**4.755.942.927,00**	**4.238.402.090,00**	**4.331.103.140,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **9.300**	**5.168.064.224,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	20.701.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu*				100 %	100 %	3.318.260.087,00	3.153.760.700,00	3.139.000.700,00	-179.259.387,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		3.139.737.736,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.012.020.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.054.681.487,00	2.892.702.100,00	2.892.702.100,00	-161.979.387,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			3.017.945.736,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.012.020.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	263.578.600,00	261.058.600,00	246.298.600,00	-17.280.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			121.792.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	20.701.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	0 %	53.567.800,00	0,00	0,00	-53.567.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		28.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.012.050.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	0 Paket	53.567.800,00	0,00	0,00	-53.567.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			28.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	20.701.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks layanan administrasi perangkat daerah*				75 %	75 %	263.544.050,00	134.137.280,00	160.408.080,00	-103.135.970,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		367.298.920,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.012.060.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	5.088.500,00	5.088.500,00	5.088.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			5.599.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	207.012.060.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	13.849.300,00	0,00	15.970.000,00	2.120.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			15.078.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.012.060.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	4 Paket	37.802.300,00	0,00	8.580.050,00	-29.222.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			42.229.440,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	207.012.060.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				58 Paket	53 Paket	43.632.000,00	28.469.480,00	28.469.480,00	-15.162.520,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			39.084.870,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.012.060.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	3 Paket	14.605.600,00	14.619.600,00	13.632.000,00	-973.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			23.493.910,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	207.012.060.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	2 Dokumen	5.966.300,00	5.966.300,00	5.966.300,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			93.684.480,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.012.060.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6.159.050,00	2.464.400,00	4.332.750,00	-1.826.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			6.775.120,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	207.012.060.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	134.831.000,00	75.919.000,00	75.919.000,00	-58.912.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			139.582.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		-	-	-	-	-	-	-	**4.755.942.927,00**	**4.238.402.090,00**	**4.331.103.140,00**	-	-	-	-	-	-	-	**5.168.064.224,00**	-
	207.012.060.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.610.000,00	1.610.000,00	2.450.000,00	840.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing			1.771.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																berbasis produk unggulan dan inovasi				
		[Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat ; Nilai IKM]	**Nilai IKM**	**90** **9.300**	**8.825** **90**	**90** **9.300**	-	-	**4.755.942.927,00**	**4.238.402.090,00**	**4.331.103.140,00**	-	-	-	-	-	-	**90** **9.300**	**5.168.064.224,00**	-
	20.701.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD*				80 %	80 %	117.679.950,00	0,00	192.027.600,00	74.347.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		96.891.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	207.012.070.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	64.438.000,00	0,00	96.657.000,00	32.219.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			38.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.012.070.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	8 Unit	53.241.950,00	0,00	95.370.600,00	42.128.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			58.391.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	20.701.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah*				80 %	80 %	682.837.480,00	683.215.000,00	561.924.700,00	-120.912.780,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		1.225.088.438,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.012.080.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	180.903.900,00	180.903.900,00	138.013.600,00	-42.890.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			198.750.257,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	207.012.080.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	501.933.580,00	502.311.100,00	423.911.100,00	-78.022.480,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.026.338.181,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	20.701.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik*				80 %	80 %	222.409.160,00	188.069.160,00	198.259.160,00	-24.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		199.463.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	207.012.090.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			43.109.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.012.090.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	17 Unit	85.600.000,00	85.600.000,00	85.600.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			81.455.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	207.012.090.005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0 Unit	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			440.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.012.090.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	37 Unit	27.159.160,00	23.279.160,00	33.469.160,00	6.310.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			24.959.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	207.012.090.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	70.060.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-30.060.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			49.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersedia**				**25 %**	**25 %**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-98.900.000,00**							**1.100.000,00**	
		[Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun]	**Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja**	**480**	**480**	**480**	-	-	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**480**	**1.100.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	20.702.201	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun*				-	0 persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		1.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.022.010.001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			1.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi**				**47,92 %**	**47,92 %**	**538.983.824,00**	**255.299.765,00**	**255.299.765,00**	**53.899.695,00**							**592.883.519,00**	
		[Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi]	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi**	**387**	**395**	**387**	-	-	**538.983.824,00**	**255.299.765,00**	**255.299.765,00**	-	-	-	-	-	-	**387**	**592.883.519,00**	-
	20.703.201	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi*				80 persen	80 persen	507.350.299,00	253.229.465,00	253.229.465,00	-254.120.834,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat / pencari kerja		558.085.349,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	207.032.010.001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				96 Orang	48 Orang	507.350.299,00	253.229.465,00	253.229.465,00	-254.120.834,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			558.085.349,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	20.703.202	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina*				80 persen	80 persen	31.633.525,00	2.070.300,00	2.070.300,00	-29.563.225,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat / pencari kerja		34.798.170,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	207.032.020.001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				12 Lembaga	12 Lembaga	31.633.525,00	2.070.300,00	2.070.300,00	-29.563.225,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			34.798.170,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
4	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan di Dalam Negeri**				**16,73 %**	**16,73 %**	**156.095.245,00**	**93.109.550,00**	**89.971.600,00**	**17.408.984,00**							**173.504.229,00**	
		[Persentase Tenaga Kerja Yang Di Tempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui MekanismeLayanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota]	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.**	**4.650**	**4.645**	**4.650**	-	-	**156.095.245,00**	**93.109.550,00**	**89.971.600,00**	-	-	-	-	-	-	**4.650**	**173.504.229,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	20.704.201	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan*				46,60 persen	46,60 persen	95.866.475,00	26.610.250,00	26.610.250,00	-69.256.225,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat / pencari kerja		107.251.980,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.042.010.005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				270 Orang	125 Orang	95.866.475,00	26.610.250,00	26.610.250,00	-69.256.225,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			107.251.980,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	20.704.203	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase Penyebarluasan Informasi Kerja*				80 persen	80 persen	60.228.770,00	66.499.300,00	63.361.350,00	3.132.580,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat / pencari kerja		66.252.249,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.042.030.002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				250 Orang	150 Orang	60.228.770,00	66.499.300,00	63.361.350,00	3.132.580,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			66.252.249,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial**				**1444 Orang**	**1444 Orang**	**382.941.450,00**	**689.941.450,00**	**686.491.450,00**	**375.994.695,00**							**758.936.145,00**	
		[Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)]	**Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial**	**0**	**0**	**0**	-	-	**382.941.450,00**	**689.941.450,00**	**686.491.450,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**758.936.145,00**	-
	20.705.202	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama*				75 persen	75 persen	382.941.450,00	689.941.450,00	686.491.450,00	303.550.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perusahaan dan pekerja		758.936.145,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	207.052.020.001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				7 Perkara	7 Perkara	24.591.100,00	24.591.100,00	27.811.100,00	3.220.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			27.050.430,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	207.052.020.002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				3 Perkara	3 Perkara	4.200.600,00	4.200.600,00	4.200.600,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			4.620.990,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		-	-	-	-	-	-	-	**382.941.450,00**	**689.941.450,00**	**686.491.450,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**758.936.145,00**	-
	207.052.020.005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				1593 Orang	3156 Orang	354.149.750,00	661.149.750,00	654.479.750,00	300.330.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			727.264.725,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**797.227.815,00**	**691.138.263,00**	**605.024.863,00**	**-192.202.952,00**							**876.952.395,00**	
	331	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**797.227.815,00**	**691.138.263,00**	**605.024.863,00**	**-192.202.952,00**							**876.952.395,00**	
1	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri**				**26.00 %**	**26.00 %**	**719.630.190,00**	**632.019.638,00**	**545.906.238,00**	**71.963.800,00**							**791.593.990,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Persentase Peningkatan Nilai Produksi, Persentase Peningkatan Jumlah Unit Usaha Industri, Persentase Penggunaan Teknologi dalam Industri, Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Industri]	**Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial**	**0**	**0**	**0**	-	-	**719.630.190,00**	**632.019.638,00**	**545.906.238,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**791.593.990,00**	-
	33.102.201	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*				66,67 persen	66,67 persen	719.630.190,00	632.019.638,00	545.906.238,00	-173.723.952,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM		791.593.990,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	331.022.010.002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	25.647.025,00	8.581.100,00	8.581.100,00	-17.065.925,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			28.212.085,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	331.022.010.003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	164.534.826,00	122.336.867,00	116.086.867,00	-48.447.959,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			180.988.390,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	331.022.010.005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	309.693.639,00	317.134.349,00	267.382.399,00	-42.311.240,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			340.662.960,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**719.630.190,00**	**632.019.638,00**	**545.906.238,00**	-	-	-	-	-	-	-	**791.593.990,00**	-
	331.022.010.008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota																		
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.830.150,00	4.332.000,00	4.332.000,00	-6.498.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing			11.913.330,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																berbasis produk unggulan dan inovasi				
2	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase izin usaha industri yang diterbitkan**				**100 %**	**100 %**	**60.657.325,00**	**52.342.225,00**	**52.342.225,00**	**6.066.310,00**							**66.723.635,00**	
		[Persentase Perusahaan Industri yang memiliki NIB RBA, Persentase Perusahaan Industri yang menerapkan standardisasi mutu produk]	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**	**0**	**0**	**0**	-	-	**60.657.325,00**	**52.342.225,00**	**52.342.225,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**66.723.635,00**	-
	33.103.201	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Industri Yang Difasilitasi*				6 IKM	6 IKM	60.657.325,00	52.342.225,00	52.342.225,00	-8.315.100,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM		66.723.635,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	331.032.010.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	11.725.950,00	7.263.950,00	7.263.950,00	-4.462.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			12.898.875,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	331.032.010.004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	48.931.375,00	45.078.275,00	45.078.275,00	-3.853.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			53.824.760,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Jumlah data perusahaan IKM yang masuk ke dalam SIINAS Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)**				**1 61,67 75 perusahaan Nilai %**	**1 61,67 perusahaan Nilai**	**16.940.300,00**	**6.776.400,00**	**6.776.400,00**	**1.694.470,00**							**18.634.770,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		-	-	-	-	-	-	-	**16.940.300,00**	**6.776.400,00**	**6.776.400,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**18.634.770,00**	-
	33.104.201	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Informasi Industri*				66,67 persen	66,67 persen	16.940.300,00	6.776.400,00	6.776.400,00	-10.163.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Pelaku usaha/ IKM		18.634.770,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	331.042.010.001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	7.958.850,00	3.183.800,00	3.183.800,00	-4.775.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			8.755.065,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		[Persentase Perusahaan Industri yang terdaftar di SIINas, Persentase Perusahaan Industri yang melaporkan perkembangan usaha di SIINas]	**Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan**	**0**	**0**	**0**	-	-	**16.940.300,00**	**6.776.400,00**	**6.776.400,00**	-	-	-	-	-	-	**0**	**18.634.770,00**	-
	331.042.010.003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	8.981.450,00	3.592.600,00	3.592.600,00	-5.388.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			9.879.705,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R)							**6.731.191.261,00**	**5.967.891.118,00**	**5.967.890.818,00**	**-763.300.443,00**							**7.571.440.512,00**	
	331	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**797.227.815,00**	**691.138.263,00**	**605.024.863,00**	**-192.202.952,00**							**876.952.395,00**	
1	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentese realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri**				**100 %**	**100 %**	**719.630.190,00**	**632.019.638,00**	**545.906.238,00**	**71.963.800,00**							**791.593.990,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**719.630.190,00**	**632.019.638,00**	**545.906.238,00**	-	-	-	-	-	-	**-**	**791.593.990,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	33.102.201	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*				66,67 persen	66,67 persen	719.630.190,00	632.019.638,00	545.906.238,00	-173.723.952,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pelaku usaha/ IKM		791.593.990,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	331.022.010.003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	0 Dokumen	63.252.750,00	63.252.550,00	0,00	-63.252.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			69.578.214,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	331.022.010.004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	145.671.800,00	116.382.772,00	149.523.872,00	3.852.072,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			160.239.011,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	JUMLAH								**6.731.191.261,00**	**5.967.891.118,00**	**5.967.890.818,00**	**-763.300.443,00**							**7.571.440.512,00**	

Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengusulkan 7 Program, 13 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 5.967.891.118,- . Pada perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 menjadi 7 Program, 14 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 5.967.890.818,-

Adapun pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan rincian kegiatan ada sebanyak 14 Sub Kegiatan yang lama, 1 Sub Kegiatan dihilangkan dan 4 Sub Kegiatan baru jadi berjumlah 19 Sub Kegiatan yang diusulkan dalam anggaran perubahan Tahun 2026.

Alasan Penambahan/Pengurangan Pagu Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2026 sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penambahan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 262.950,- dari pagu APBD awal Tahun 2026 Rp. 15.109.650,- menjadi Rp. 15.372.600,-. Penambahan anggaran, karena penyesuaian harga merk tinta printer sesuai kebutuhan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Sub kegiatan ini anggaran berkurang sebesar Rp. 14.760.000,- dari pagu APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp. 261.058.600,- menjadi Rp. 246.298.600,- Pengurangan anggaran dikarenakan mengurangi pagu honor PPTK yang tidak

terealisasi, dan anggarannya dipindahkan ke subkeg lainnya

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Sub Kegiatan Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor membutuhkan penambahan anggaran sebesar Rp. 15.970.000,- dari pagu APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp. 0,- menjadi Rp. 15.970.0000,-. Penambahan anggaran dikarenakan untuk kebutuhan pengadaan mesin pencacah kertas untuk pemusnahan arsip sesuai ketentuan, dan Mesin Absen (Finjer).

2) Sub Kegiatan Penyedian Peralatan Rumah Tangga

   Sub Kegiatan Penyedian Peralatan Rumah Tangga membutuhkan penambahan anggaran sebesar Rp. 8.580.050,- dari pagu APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp. 0,- menjadi Rp. 8.580.050,-. Penambahan anggaran dikarenakan untuk kebutuhan pengadaan kursi kerja pengganti yang sudah lama, Dispenser untuk ruangan laktasi sesuai standar pelayanan.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pengurangan anggaran sebesar Rp. 987.600,- dari pagu APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp. 14.619.600,- menjadi Rp. 13.632.000,-. Pengurangan anggaran dikarenakan ada belanja yang tidak dapat dibelanjakan/direalisasikan.

4) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

   Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu penambahan anggaran sebesar Rp. 1.868.350,- dari pagu APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp.

2.464.400,- menjadi Rp. 4.332.750,-. Penambahan anggaran untuk makan minum tamu.

5) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD penambahan anggaran sebesar Rp. 1.868.350,- dari pagu APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp. 2.464.400,- menjadi Rp. 4.332.750,-. Penambahan anggaran untuk pembelian box arsip.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kebutuhan akan kendaraan dinas untuk mendukung kegiatan operasional kantor dan lapangan mengalami penambahan dari anggaran sebesar Rp. 96.657.000,- dari sebelumnya pada APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp. 0,- menjadi Rp. 96.657.000,-. Penambahan anggaran karena untuk pengadaan kendaraan dinas sebanyak 3 unit, untuk pengganti kendaraan yang rusak berat.

2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kebutuhan akan peralatan kerja yang memadai seperti komputer dan printer mengalami penambahan sebesar Rp. 95.370.600,- dari sebelumnya pada APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp. 0,- menjadi Rp. 95.370.600,-. Penambahan anggaran karena kebutuhan operasional untuk pengadaan laptop untuk kelengkapan BLUD, bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan sekretariat. Pengadaan printer untuk sekretariat, bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini pengurangan anggaran sebesar Rp. 42.890.300,- dari pagu APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp. 180.903.900,- menjadi Rp. 138.013.600,-. Pengurangan belanja Listrik, karena efisiensi dan dilaihkan ke belanja peralataan mesin.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini pengurangan anggaran sebesar Rp. 78.400.000,- dari pagu APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp. 502.311.100,- menjadi Rp. 423.911.100,-. Pengurangan anggaran dikarenakan mengurangi tenaga outsorcing dan dialihkan anggarannya ke subkegiatan lainnya.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 10.190.000,- dari pagu APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp. 23.279.160,- menjadi Rp. 33.469.160,-. Penambahan anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya serta BBM Genset.

II. Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Sub Kegiatan ini, pengurangan anggaran sebesar Rp. 3.137.950,- dari anggaran APBD awal Tahun

2026 Rp. 66.499.300,- menjadi Rp. 63.361.350,-. Pengurangan ini terjadi karena penyesuaian gaji PPPK PW di Bidang Tenaga Kerja, hasil pengurangan ini ditambah dengan rasionalisasi pada sub kegiatan lain di pindahkan ke sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya untuk belanja modal pengadaan laptop.

III. Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan Pencegahan Peselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pencegahan Peselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Adanya penambahan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.220.000,- dari anggaran APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp. 24.591.100,- menjadi Rp. 27.811.100,-. Penambahan angaran ini untuk belanja makan minum ke lapangan sebanyak Rp.3.220.000. Anggaran ini di ambil dari rasionalisasi angaran makan minum sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja. Makan minum ke lapangan ini dibutuhkan karena pada tahun ini tim pencegahan akan turun ke perusahaan dan melibatkan tim dari BPJS kesehatan dan pengawas ketenagakerjaan.

2) Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

Terdapatnya pengurangan anggaran pada sub kegitan ini sebesar Rp. 6.670.000,- dari anggaran

APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp. 661.149.750,- menjadi Rp. 654.479.750,-. Pengurangan ini terjadi karena anggaran makan minum rapat di alihkan sebagian sebanyak Rp. 6.670.000,- untuk belanja makan minum ke lapangan sub keg pencegahan perselisihan.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

I. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Terdapatnya pengurangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.250.000,- dari anggaran APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp. 122.336.867,- menjadi Rp. 116.086.867,-. Pengurangan ini terjadi karena sewa peralatan pelatihan dikurangi karena kelompok peserta akan dibuat 2 kelompok saja sehingga jumlah alat berkurang.

2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Pengurangan pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 49.751.950,- dari anggaran APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp. 317.134.349,- menjadi Rp. 267.382.399,-. Pengurangan ini terjadi karena kegiatan even fashion show Dekranasda yang diikuti tahun ini hanya satu even dan tren kedatangan tamu berkurang sehingga berpengaruh pada serapan anggaran.

C. UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Rendang (P3R)

I. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

   Terdapatnya pengurangan anggaran sebesar Rp. 63.252.550,- dari Anggaran APBD awal Tahun 2026 Rp. 63.252.550,- menjadi Rp. 0,- karena sub kegiatan ini dihilangkan atau dihapus karena dalam rangka penyesuaian prioritas kegiatan serta mendukung proses pembentukan kelembagaan BLUD UPTD Pusat Pelayanan dan Pengembangan Randang (P3R), dilakukan pengalihan Sub Keg Inkubator Bisnis ke Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

   Terdapatnya penambahan anggaran seberas Rp. 33.141.100,- dari anggaran APBD awal Tahun 2026 sebesar Rp. 116.382.772,- menjadi Rp. 149.523.872,-. Penambahan anggaran ini terjadi dikarenakan pada kebutuhan untuk pemenuhan sertifikasi tenaga operator pesawat uap sebagai bagian dari standar keselamatan dan operasional industri rendang, serta pengadaan belanja modal berupa laptop dan handphone guna menunjang pemasaran berbasis digital.

BAB IV
PENUTUP

IV.1 Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, serta perkembangan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dan perindustrian. Perubahan Renja ini tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025–2029, serta RKPD Perubahan Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Konsistensi pencapaian target kinerja.
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.
3. Optimalisasi penyerapan anggaran.
4. Peningkatan kualitas data dan informasi kinerja.
5. Penguatan koordinasi dan sinergi.
6. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7. Antisipasi terhadap perubahan kebijakan dan kondisi eksternal.

IV.2 Kaidah Pelaksanaan

Agar Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara optimal, perlu diperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip

efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan berorientasi pada hasil.

3. Setiap program, kegiatan dan subkegiatan dilaksanakan berdasarkan target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja serta dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen penganggaran yang berlaku.
4. Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan keterkaitan antara input, proses, output dan outcome sehingga penggunaan sumber daya dapat memberikan hasil yang optimal terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah.
5. Kepala Dinas bersama seluruh pejabat dan pelaksana terkait melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan secara berkala.
6. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan, penyesuaian dan percepatan pelaksanaan kegiatan apabila terdapat deviasi antara target dan realisasi.
7. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan, kondisi yang bersifat mendesak atau perkembangan lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, penyesuaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaksanaan Perubahan Renja harus memperkuat keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

IV.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II serta perubahan kondisi dan kebutuhan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

3. Melakukan optimalisasi penggunaan anggaran.
4. Meningkatkan koordinasi antarbidang dan antarperangkat daerah.
5. Memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan industri, lembaga pelatihan dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi kinerja.
7. Melakukan tindak lanjut terhadap indikator kinerja yang belum mencapai target.
8. Menjaga kesinambungan pencapaian target Renstra Tahun 2025–2029.
9. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 merupakan instrumen penting untuk memastikan agar pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian tetap responsif terhadap hasil evaluasi, perubahan kondisi, kebutuhan masyarakat serta perkembangan kebijakan pembangunan daerah.

Melalui pelaksanaan yang konsisten, pengendalian yang efektif, koordinasi yang kuat dan evaluasi secara berkala, diharapkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disesuaikan dalam Perubahan Renja Tahun 2026 dapat terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel. Selanjutnya, hasil pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2026 akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya serta menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pencapaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025–2029.

Demikian Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sisa Tahun Anggaran 2026.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kinerja pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian secara berkelanjutan.

Payakumbuh, Juli 2026
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh



YASRIL, S.ST.,MT
Pembina TK I
NIP. 19691017 199003 1 006